

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Sistem ABT Bukan untuk Kenaikan Tarif

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengingatkan, sistem tiket berbasis akun atau account based ticketing (ABT) untuk transportasi umum di Jakarta demi kemajuan, bukan kenaikan tarif. Transportasi umum itu adalah Transjakarta, LRT Jakarta dan MRT Jakarta, hingga KRL Commuterline Jabodetabek.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik Zoelkifli (MTZ) mengatakan, wacana penerapan harga tiket berbasis akun untuk moda transportasi umum yang dikelola PT JakLingko Indonesia menuai kontroversi.

Sebab, salah satu konsekuensinya adalah kenaikan tarif, dan pembedaan tarif antara warga ber-KTP Jakarta dengan warga luar Jakarta.

"Sistem account based ticketing bukanlah untuk menaikkan tarif, tetapi kemajuan transportasi. Maksudnya warga yang memang tinggal di Jakarta, bayar pajak di Jakarta, diharapkan mendapatkan manfaat maksimal dari pelayanan transportasi pemerintahnya sendiri," kata MTZ berdasarkan keterangannya pada Selasa (26/9/2023).

Menurut dia, kenaikan tarif itu pada akhirnya terjadi karena harus ada penyesuaian dan penyamaan harga tiket antara MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta dan KRL Commuterline

Jabodetabek. MTZ juga menolak kenaikan tarif transjakarta, karena keinginan warga Jakarta untuk menaiki transportasi umum masih rendah.

"Kalau tarif dinaikkan, orang makin malas naik kendaraan umum. Tahun 2022 sudah ada riset dari PT MRT bahwa willingness to pay atau keinginan membayar warga Jakarta jatuh pada harga tertinggi Rp 5.000," ujar MTZ.

Jika tarif di atas itu, kata dia, sebagian besar pengguna kendaraan umum memilih kembali naik kendaraan pribadi. Karena itu, persoalan tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini berujar, kemajuan Jakarta harus segera disebut. Apalagi rancangannya sudah selesai, konsepnya tinggal dijalankan sehingga masyarakat tertarik naik kendaraan umum.

"APBD Jakarta pada 2024 nanti diharapkan tidak memasukkan kenaikan tarif sebagai variabel, yang akan muncul pada diskusi soal besaran penanaman modal daerah (PMD) pada PT Transjakarta dan lain-lain," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerapkan tarif transportasi umum berbasis status ekonomi dan domisili penumpang. Kebijakan ini diwacanakan supaya alokasi dana subsidi atau public service obligation (PSO) dari pemerintah daerah bisa tepat sasaran.

(faf)



istimewa